

DWI FUNGSI MEDIA MASSA

Dedi Kusuma Habibie
habibiemap@gmail.com
Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada

Article Info

Keyword:

Media Massa, komunikasi politik, partisipasi politik

Abstract

Mass media should provide constructive information in order to full fill its function as a tool for developing nations. However, mass media usually face a conflict of interest in doing the role, for example in the Indonesian case there is a strong political economy interest of media owner that limiting media's role as political control. This study sees those is a crucial problem of Indonesian media as it will decrease the quality of Indonesian media and as the consequences, it will lose public trust. By using descriptive qualitative method this article doing a theoretical review to explain the role of Indonesian media in the political communication and how the media doing their role as information and political channel in the political communication process. This study suggests the media do a role called 'dwifungsi media' that suggest media to do its function comprehensively.

Copyright © 2018 Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi.

PENDAHULUAN

Media massa merupakan sarana menyebarkan informasi kepada masyarakat, menurut Bungin (2006:72) media massa diartikan sebagai media komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran informasi secara masal dan dapat diakses oleh masyarakat banyak, ditinjau dari segi makna, media massa merupakan alat atau sarana untuk menyebarluaskan isi berita, opini, komentar, hiburan, dan lain sebagainya.

Menurut Canggara, media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak, sedangkan pengertian media massa sendiri alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti surat kabar, film, radio dan televisi (Canggara, 2010:123,126)

Perkembangan teknologi saat ini juga sangat mempengaruhi peran media massa, kebebasan media massa dan dukungan dari teknologi tersebut dapat menghadirkan dua kondisi, satu sisi akses informasi yang semakin mudah untuk masyarakat akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan yang pada

akhirnya akan menciptakan kondisi yang demokratis, namun di sisi lainnya adalah kebebasan yang dimaksud tidak diiringi dengan tanggung jawab akan menimbulkan kebebasan yang tidak terarah. Teknologi memfasilitasi proses keterhubungan dalam skala yang lebih besar. Fenomena ini meningkat keterkaitan ekonomi, politik, masyarakat dan budaya dianggap sebagai globalisasi. Media disajikan sebagai alat untuk mempercepat proses ini dan menghilangkan batas.

Perlu digarisbawahi bahwa perubahan-perubahan yang terjadi pada media akan selalu disertai oleh perubahan pada masyarakatnya (Straubhaar,2008: 13-15).semua aspek tersebut meninggalkan masyarakat atau warga negara sendirian menghadapi kapitalisasi media. Tentu saja beragam klaim yang sering dikutip menyatakan bahwa perkembangan media merefleksikan perkembangan masyarakat atau dengan kata lain, masyarakatlah yang mempengaruhi perkembangan media ke arah tertentu; bahwa konten media merefleksikan selera, keinginan, dan aspirasi pasar.

Sayangnya, tidak ada pihak yang mendesakkan kepentingan warga negara; tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas situasi di mana sebagian besar konten media tidak memiliki komponen edukatif yang signifikan, yang sangat penting dalam

Corresponding Author:

Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada
Jl. Prof. Dr. Sardjito, Sekip, Yogyakarta 55281
Email: habibiemap@gmail.com

membangun masyarakat yang kuat; yang amat penting untuk negara berkembang yang rapuh seperti Indonesia.

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Pasal 28F UUD 1945, Amandemen Kedua). Media berperan sentral dalam masyarakat saat ini. Melalui media, informasi, pandangan, gagasan dan wacana saling dipertukarkan dan kemajuan masyarakat juga tercermin di dalamnya. Dalam masyarakat modern, media tertanam secara mendalam di dalam kehidupan sosial: tidak ada perkara sosial yang tidak melibatkan media

Tuntutan akan partisipasi dan keterlibatan publik dalam pemerintahan mensyaratkan kebebasan pers. Media harus mampu mendorong partisipasi warga negara dalam memperoleh, menghasilkan, dan menyebarkan informasi. Namun, hal tersebut belum cukup untuk memastikan transformasi menyeluruh dari ranah publik. Mekanisme-mekanisme lain juga harus dijaga agar publik mendapatkan hak-haknya. Menurut Habermas (1989), jaminan konstitusional atas ranah publik tidak selalu dapat dijalankan karena sangat dipengaruhi oleh para aktor politik dan kebudayaan. Di sini, media berperan penting dalam membuka wacana, memicu kesadaran, membangun diskusi, dan mengatur agenda. Dengan demikian, media harus selalu didorong dan diingatkan mengenai peran mediasi mereka.

Kerangka Teoritis

Sebuah berita mempunyai sumber dan sumber berita ini menjadi isu berita yang oleh media sering diinformasikan dengan tidak seperti adanya (netral), ia (peliput atau penulis atau pemilik media) mempunyai kepentingan tersendiri yang terselubung untuk mempengaruhi publik (masyarakat pengguna), sehingga pada akhirnya terjadilah pembentukan opini dan perubahan perilaku masyarakat pengguna serta juga perubahan pada budayanya . Berangkat dari kekhawatiran ini penulis kemudian mencoba untuk mengingatkan kembali bagaimana sebenarnya media massa memainkan perannya didalam sistem pemerintahan yang demokratis.

Berbagai teori, konsep dan pendapat penulis hadirkan untuk mengingatkan kembali bahwa media massa dan berbagai bentuk media yang digunakannya akan mempengaruhi perilaku ataupun budaya suatu masyarakat. Penulis menggunakan jenis penelitian studi literatur dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Referensi teori yang diperoleh dengan jalan penelitian studi literatur dijadikan sebagai fondasi dasar dan alat utama untuk membahas berbagai isu terkait dengan dwifungsi media massa. Adapun teori atau konsep yang digunakan terkait dengan bidang keilmuan komunikasi politik, kebijakan publik, dan sosiologi politik.

Media Massa dan Pembentukan Opini Publik

Istilah media massa sendiri berkembang penggunaannya ketika digunakan untuk menjelaskan bahwa komunikasi digunakan dalam skala yang lebih besar. Menurut (Elvinaro, 2007:14-17). Fungsi media massa bisa dibagi menjadi lima, a) Pengawasan (surveillance), b) Penafsiran (Interpretation), c) Pertalian (Linkage), d) Penyebaran Nilai – Nilai (Transmission of Value), e) Hiburan (Entertainment). McQuail (Nurudin, 2004) juga mengemukakan beberapa asumsi pokok mengenai arti penting dari media massa seperti berikut :

- a) Media merupakan industri yang berubah dan berkembang yang menciptakan lapangan kerja, barang, dan jasa serta menghidupkan industri lain yang terkait. Contoh konkret dapat dilihat bahwa sejak reformasi tahun 1998 banyak institusi media baru, seperti jumlah televisi meningkat cepat. Sebaliknya, ditemukannya internet dan munculnya majalah digital membuat majalah Newsweek kehilangan banyak pembacanya, dan akhirnya memutuskan untuk tidak terbit lagi.
- b) Media juga merupakan industri tersendiri yang memiliki peraturan dan norma-norma yang menghubungkan institusi tersebut dengan masyarakat dan institusi sosial lainnya. Contoh, pemberitaan media adakalanya bias atau menekankan sebuah isu dan mengabaikan isu lain karena isu ini dianggap isu yang sedang hangat dan penting untuk diketahui oleh banyak audiens.
- c) Media merupakan sumber kekuatan karena dapat

digunakan sebagai alat kontrol, yang dapat didayagunakan sebagai pengganti kekuatan atau sumber daya lainnya. Contoh media dapat digunakan sebagai alat penjaga demokrasi karena berperan menyajikan berbagai opini masyarakat.

- d) Media merupakan wadah yang semakin berperan menampilkan peristiwa kehidupan masyarakat, baik yang bertaraf nasional maupun internasional. Contohnya, sering kali kita mengetahui lebih banyak tentang kegiatan pemilu di AS awal November lalu daripada tahu tentang kegiatan kampanye pilkada yang terjadi di provinsi lain di Indonesia.
- e) Media sering kali berperan sebagai wahana pengembangan kebudayaan, bukan saja dalam pengertian pengembangan bentuk seni dan simbol, tetapi juga dalam pengertian pengembangan tata cara, mode, gaya hidup, dan norma-norma.
- f) Media telah menjadi sumber dominan bukan saja bagi individu untuk memperoleh gambaran dan citra realitas sosial, tetapi juga bagi masyarakat dan kelompok secara kolektif. Media juga menyuguhkan nilai-nilai dan penilaian normatif yang dibaurkan dengan berita dan hiburan.

Apapun peran yang dimainkan oleh media massa akan menghasilkan suatu informasi, media massa harus mampu menyajikan informasi tentang berbagai isu publik bagi setiap warga negara. Atas dasar itu, fungsi media massa atau pers mencakup: pers atau media sebagai *civic form*, pers sebagai pengawas pemerintah (Norris, 2001). Sebagai *civic form* pers dapat dijadikan sebagai alat komunikasi publik.

Istilah komunikasi publik, komunikasi massa biasanya sering dikaitkan dengan media massa, kedua istilah tersebut merujuk pada isi dari informasi yang disampaikan, isi informasi ini sangat dipengaruhi oleh unsur – unsur komunikasi, menurut Deddy Mulyana (2009: 69-71) terdapat lima unsur yang saling bergantung sama lain yakni sumber, pesan, saluran atau media, penerima dan efek. Dengan memperhatikan berbagai unsur komunikasi tersebut dapat dijadikan analisis untuk melihat bagaimana sebuah informasi terbentuk kemudian proses penyampainnya serta dampak yang ditimbulkannya.

Ruben dan Steward (2006:356-357) menjelaskan bahwa karakter komunikasi publik dan komunikasi massa sebagai berikut. 1. Memiliki audiens. 2. Bukan bersifat pribadi (*impersonal*). 3. Direncanakan, dapat diprediksi dan bersifat formal. 4. Kontrol dilakukan oleh pembicara atau komunikator. Pembicara di sini punya kemampuan untuk menciptakan informasi apa yang akan disampaikan. 5. Berpusat pada pembicara atau komunikator. Di sini pembicara mempunyai akses untuk berbicara kepada semua audiens, namun audiens tak punya akses yang sama baik kepada pembicara maupun akses kepada sesama audiens. 6. Umpan balik (*feedback*) yang terbatas.

William Albiq (dalam Ollie 2007:20) menjelaskan bagaimana opini publik terbentuk, menurutnya opini publik adalah suatu jumlah dari pendapat individu individu yang diperoleh melalui perdebatan dan opini publik merupakan hasil interaksi antar individu dalam suatu publik. Jika dilihat dari segi ilmu komunikasi, opini publik merupakan tindakan komunikasi yang mana membawa persoalan kepada orang-orang dengan harapan akan memperoleh tanggapan atau umpan balik.

Untuk menjelaskan bagaimana media massa membentuk opini publik ada baiknya memperhatikan beberapa teori ;

Pertama, teori Analisis Kultivasi dikemukakan oleh Gerbner (1969). Teori ini adalah teori yang memprediksikan dan menjelaskan formasi dan pembentukan jangka panjang dari persepsi, pemahaman, dan keyakinan mengenai dunia sebagai akibat dari konsumsi akan pesan-pesan media. Analisis Kultivasi berkembang dengan dua perspektif, yakni perspektif transmisional dan perspektif ritual. Perspektif transmisional adalah posisi yang menggambarkan media sebagai pengirim pesan-pesan ke seluruh penjuru ruang. Sedangkan perspektif ritual adalah posisi yang menggambarkan media sebagai pembawa representasi mengenai keyakinan yang dimiliki bersama (West dan Turner, 2008:82-83).

Kedua, Teori agenda setting model menurut Ardianto, Komala, dan Karlinah, (2009:77) menekankan adanya hubungan positif antara penilaian yang diberikan media pada suatu persoalan tersebut, Dengan kata lain, apa

yang dianggap penting oleh media, akan dianggap penting juga oleh masyarakat. Apa yang dilupakan media, akan luput juga dari perhatian masyarakat. Adapun efek dari agenda setting model terdiri atas efek langsung dan efek tidak langsung. Efek langsung berkaitan dengan isu: apakah isu itu ada atau tidak ada dalam agenda khalayak; dari semua isu, mana yang dianggap paling penting menurut khalayak; sedangkan efek lanjutan berupa persepsi (pengetahuan tentang peristiwa tertentu) atau tindakan.

Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa berita menjadi sesuatu yang dianggap penting oleh masyarakat, mengingat berita diperoleh dari hasil kegiatan jurnalistik sehingga berita memiliki pengaruh terhadap pembentukan opini publik. Cahnley dalam Effendy (2003:131) mendefinisikan berita sebagai laporan tercepat mengenai fakta atau opini yang mengandung hal yang menarik minat atau penting, atau kedua-duanya, bagi sejumlah besar penduduk.

Kemudian sebuah berita dapat dinilai menurut Wilbur Schramm (dalam Muis 1999:42-44), beberapa faktor yang menentukan nilai berita, a) kesegaran peristiwa atau aktualitas, b) kedekatan kejadian dari pembaca (*proximity*, *proximitas*), c) keterkenalan (*prominence*), d) sifat penting suatu kejadian (*significance*), e) *Magnitude* (ukuran besar kecilnya peristiwa berita).

Oleh karena itu penulis mengingatkan kembali melalui pendapat Hikmat kusumaningrat dan purnama kusumaningrat (2006:48-55) mengenai etika pemberitaan, a) berita harus akurat, b) berita harus lengkap, adil dan berimbang, c) berita harus objektif, dan d) berita harus baru dan hangat.

Media Massa dan Komunikasi Politik

Secara historis, Reformasi 1998 merupakan titik balik dan dianggap sebagai landasan utama dalam upaya memastikan hak-hak warga negara atas media. Setelah itu, muncul amandemen UUD 1945 dan UU Hak Asasi Manusia No. 39/1999 yang menjamin hak atas informasi dan media bagi warga. Dua kebijakan pasca-reformasi tersebut menjadi kerangka hukum dan peraturan media, yaitu UU Pers No. 40/1999 dan UU Penyiaran No. 32/2002. Secara normatif, kedua peraturan tersebut telah berada di jalur yang benar,

yakni menjamin prasyarat dasar bagi warga negara untuk menjalankan kebebasan berekspresi dan berpendapat. Meski begitu, implementasinya punya kisah berbeda.

Kemampuan media untuk membentuk sebuah model baru partisipasi ini mendukung penyebaran demokrasi hingga ke sudut-sudut terjauh dunia (Castells, 2010, Mansell, 2004). Namun Herman dan Chomsky mengingatkan, media selalu berada dalam risiko untuk dimanipulasi dan digunakan oleh “kelompok-kelompok istimewa” yang lebih berkuasa dibanding kelompok lain dalam masyarakat. Sementara pihak yang lebih kuat mendapat banyak keuntungan, pihak yang lebih lemah kehilangan hak istimewanya sebagai kumpulan aktor aktif di ranah publik. Kepentingan masyarakat, terutama mereka yang (di) lemah(kan) dan terpinggirkan, dibiarkan begitu saja karena aspirasi utama manipulasi ini adalah untuk mempertahankan dominasi kekuasaan dalam masyarakat.

Tiga model agen alternatif ini : a) stabilitas, b) pengendalian dan c) perubahan merupakan fungsi yang mungkin dapat diperankan oleh pers sebagai institusi politik. Ini dapat memunculkan asumsi bahwa bahwa pers menampilkan peran politik yang spesifik dalam masyarakat tertentu pada suatu titik waktu tertentu pula, kajian mengenai media di negara berkembang cenderung lebih menekankan dominasi atau hegemoni kekuasaan negara, di mana media digunakan sebagai alat propaganda negara atau menjadi alat kepentingan untuk melestarikan ideologi penguasa (hegemoni). Dalam hal ini ada kepentingan yang cukup signifikan dari pemegang kekuasaan untuk menggunakan media sebagai alat politik dalam mencapai tujuannya.

Terdapat 3 (tiga) pelaku dalam politik media, ialah politisi, jurnalis, dan orang-orang yang digerakkan oleh dorongan (kepentingan) khusus. Bagi politisi, tujuan dari politik media adalah dapat menggunakan komunitas massa untuk memobilisasi dukungan publik yang mereka perlukan untuk memenangkan pemilihan umum dan memainkan program mereka ketika duduk di ruangan kerja. Bagi jurnalis, tujuan politik media adalah untuk membuat tulisan yang menarik perhatian banyak orang dan menekankan apa yang disebutnya dengan “suara yang

independen dan signifikan dari para jurnalis". Bagi masyarakat, tujuannya adalah untuk keperluan mengawasi politik dan menjaga politisi agar tetap akuntabel, dengan menggunakan basis usaha yang minimal.

Konsep pengaturan agenda (McCOMBS & SHAW, 1972) menegaskan dan memadukan paradigma yang dikenal sebagai "efek terbatas." Konsep ini sebagian terinspirasi oleh pernyataan Bernard Cohen bahwa keberhasilan utama pers bukan untuk mengatakan bagaimana "orang harus berpikir, "tetapi" apa yang harus mereka pikirkan. "Konsep demikian menekankan peran dari pers untuk berbaris topik, terutama dalam konteks pemilihan.

Dalam kasus Indonesia, hal ini sangat jelas terlihat. Karena media merepresentasikan dan merupakan perwujudan kekuasaan, kepemilikan media dan kebijakan media sangatlah penting. Prinsip 'mengikuti ke mana uang mengalir' mampu mengungkapkan peranan kepentingan bisnis dalam perkembangan media, dan bagaimana *real politik* mempengaruhi perkembangan itu, dan semuanya terefleksi dalam kebijakan media di Indonesia

Penulis menilai asumsi yang mendasari penilaian tersebut adalah, *pertama* media adalah sebuah institusi dan aktor politik yang memiliki hak-hak, dengan kebebasan pers yang dimiliki serta pengawasan yang lemah memungkinkan potensi pers sebagai alat politik.

Menurut Oemar Seno Adji, ada beberapa aspek dari kebebasan pers yaitu : a) *Free Expression Press* Kemerdekaan pers harus diartikan sebagai kemerdekaan untuk mempunyai dan menyatakan pendapat melalui pers. b) Sensor preventif sebagai lembaga hukum dipandang bertentangan dengan pers merdeka, oleh karena itu harus dilarang. c) Kebebasan Pers yang dikehendaki, konsep kebebasan pers yang diinginkan bukanlah kebebasan pers yang tidak tak terbatas, tidak bersyarat dan tidak mutlak sifatnya . d) Restriksi, ada kemungkinan untuk memberikan restriksi terhadap kebebasan pers, namun bersifat represif. e) Sifat Kemerdekaan, persemerdekaan dan kebebasan pers di sini disesuaikan dengan tugas pers yang tidak saja negatif dalam karakternya dan yang berupa kritik konstruktif namun juga dalam karakter positif yang

menyampaikan inisiatif pemerintah.

Kedua, media dapat memainkan berbagai peran politik, diantaranya mendukung proses transisi demokrasi, dan melakukan oposisi, hal ini tercermin dari bagaimana sebuah berita dikemas oleh media.

Media Massa Tantangan dan Harapan

Media dapat dipahami sebagai sebuah titik pertemuan dari banyak kekuatan yang berkonflik dalam masyarakat modern, dan karena itu tingkat kerumitan isu dalam media tinggi. Hubungan antara pemerintah dan media dan politik, dan media dengan masalah globalisasi dan lokalitas, keduanya menjadi hal yang kontroversial dalam kajian media umumnya (Koike: 2002:13 -14)

Dalam menceritakan sejarah media massa kita berurusan dengan empat elemen utama yang menghasilkan konfigurasi aplikasi yang khas dan signifikan dalam yang lebih luas kehidupan masyarakat, a) tujuan, kebutuhan, atau penggunaan komunikatif tertentu; b) teknologi untuk berkomunikasi secara terbuka kepada banyak orang dari jarak yang jauh; c) bentuk organisasi sosial yang menyediakan keterampilan dan kerangka kerja untuk produksi dan distribusi; dan d) bentuk pemerintahan terorganisir dalam 'kepentingan publik'

Pengaruh media massa yang besar melahirkan sebuah teori yang begitu terkenal di tahun 1940-an dengan nama teori peluru (bullet theory), oleh Efendy (1994:264) yang mengutip penjelasan Melvin Defleur (1975) menerangkan bahwa pesan yang disampaikan oleh media massa ini dampaknya pada individu bersifat secara langsung dan segera.

Dampak media massa juga dijelaskan dalam *Social Learning Theories* atau Teori Belajar Sosial dari Albert Bandura, sebagaimana dijelaskan di dalam teori ini, dikenal konsep *reciprocal determinism*. Konsep ini menjelaskan bahwa ada interaksi timbal balik secara berkelanjutan antara kognitif, perilaku dan lingkungan. Sebagaimana secara sosial dan manusia dikenal dari perilaku yang ada berdasarkan dimana manusia tinggal, bekerja dan bersosialisasi, maka konsekuensinya adalah lingkungan manusia membentuk perilaku sebagaimana perilaku manusia menjadi pengenalan diri manusia itu di lingkungannya

Kurangnya penegakan hukum dan lemahnya birokrasi, yang sering berjalan berdasarkan kepentingan pribadi, menambah panjang daftar permasalahan dalam pengaturan media massa. Meskipun permasalahan seperti itu tak selalu timbul dalam sistem demokrasi yang masih muda seperti di Indonesia, dampaknya pada sektor media cukup berbahaya: media kehilangan karakter publiknya karena tidak ada pihak yang menjaga, termasuk negara melalui hukum dan regulasinya

Di sektor media, hak warga negara telah direduksi menjadi hak konsumen. Temuan ini selain menimbulkan keraguan tentang keberlangsungan ranah publik (*public sphere*) di Indonesia, juga menunjukkan bahwa kebijakan menjadi tidak berperan. Dalam sektor media, berbagai kebijakan yang diharapkan dapat merespon dan berperan serta menjamin karakter publik media telah nyata-nyata gagal. Berkenaan dengan hal tersebut pemikiran Habermas, Marshall McLuhan dalam karyanya yang terkenal *Understanding Media: The Extension of Man* (1964) mengajukan sebuah gagasan untuk “menyediakan” sebuah perwakilan pemerintah yang tidak langsung melalui teknologi media yang terus berkembang untuk memperluas partisipasi model baru di mana setiap orang dapat terlibat. Ia menekankan pentingnya representasi pemerintahan secara tidak langsung karena hal-hal yang berkaitan dengan negara dan masyarakat secara keseluruhan terlalu banyak, terlalu rumit, dan terlalu samar untuk dipahami oleh warga. Oleh sebab itu bagi McLuhan, berkembangnya teknologi media tidak hanya membuat seluruh dunia bisa diakses secara lokal tetapi juga menciptakan sebuah bentuk partisipasi baru di mana setiap orang dapat terlibat dalam setiap isu global. Dalam beberapa hal, kondisi ini berpotensi meningkatkan kesadaran sosial masyarakat karena mereka mulai bereaksi terhadap isu-isu global dan implikasinya terhadap persoalan lokal meskipun McLuhan juga mengingatkan bahwa fenomena ini berpotensi untuk tidak tanggap terhadap isu-isu lokal (McLuhan, 1964).

Kemudian seiring perkembangan komunikasi di era modern memungkinkan adanya saluran – saluran komunikasi lainnya yang juga memiliki peran yang besar, menurut laporan dalam studi terbaru News

Media Consumption di Amerika Serikat, Pew Research Center melaporkan bahwa konsumsi berita online meningkat tajam antara tahun 2011 dan 2012, di mana 50% responden memperoleh berita secara online sedikit lebih kecil dari televisi, tapi jauh melebihi surat kabar (29 %) dan radio (33%). Studi ini menemukan bahwa 19% responden mendapatkan berita dan informasi dari media dan jejaring sosial seperti blog, mikroblog (misalnya, Twitter) dan Facebook. 8% lainnya mengatakan mereka *mendengarkan podcast* untuk mengakses berita dan informasi

Meningkatnya peran media sosial sebagai sumber berita, serta sebagai media untuk mensharing berita dan sebagai rujukan bagi media massa, menunjukkan bahwa media massa dan media sosial tidak saling berlawanan tetapi semakin terhubung satu sama lain

Begitu besar peran media massa, Lalu bagaimana kemudian negara memainkan peran untuk mengatur media tetapi disisilain tidak membatasi kebebasannya, perlu dicatat bahwa untuk memahami kontrol negara atas media, kita bisa meminjam gagasan yang tertuang dalam Teori Kepentingan Publik dan Teori Pilihan Publik seperti yang telah dikemukakan oleh Djankov et al. (2003). Teori Kepentingan Publik, dikenal sebagai Teori Pigouvian, mengatakan bahwa kepemilikan negara atas media dikehendaki karena sedikitnya tiga alasan: informasi merupakan komoditas publik, persebaran informasi mahal dan seharusnya ditanggung pemerintah, dan netralitas informasi harus dijaga. Di sisi lain, Teori Pilihan Publik menyatakan bahwa media yang dimiliki oleh negara merupakan media yang manipulatif dan akan mendistorsi informasi demi kepentingan partai yang berkuasa, dan menanamkan peraturan yang dibuat pemerintah serta mencegah publik membuat keputusan berdasarkan informasi yang mumpuni dan pada akhirnya mengerdikan institusi demokrasi. Hal ini akan menghambat media independen untuk menyediakan suara alternatif

Asas pembatasan kepemilikan, bertujuan untuk menjamin adanya kebhinekaan atau keberagaman pendapat. Keragaman pendapat atau isi bisa dicapai antara lain melalui keberagaman media. Keragaman media bisa dicapai bila terdapat keragaman pemilik

media. Pembatasan kepemilikan dilatarbelakangi oleh landasan pemikiran untuk menumbuhkan pemikiran yang demokratis maka diperlukan keragaman pendapat, e) Asas perlindungan profesi, perlindungan terhadap profesi dalam aspek hasil karya juga dalam proses kerja insan media. Perlindungan ini diperlukan karena setiap karya dari media massa memiliki nilai ekonomi yang tinggi. f) Asas perlindungan hak perseorangan, media memberikan jaminan bahwa hak pribadi harus mendapat perlindungan, misalkan perlindungan hak privasi ketika media massa melakukan kerja jurnalistiknya.

Menimbang beberapa kasus, secara terus menerus terlihat bahwa media berperan dalam membentuk dan mereka ulang bagaimana individu, masyarakat dan kebudayaan mempelajari, merasakan, dan memahami dunia. Dengan bantuan teknologi, media mampu memperkuat informasi pada satu titik tunggal ke khalayak ramai, dalam waktu tertentu. Media begitu kuat sampai mampu memaksakan “bias, asumsi, dan nilai-nilai” (McLuhan, 1964).

Oleh karena itu perlu kembali menata ulang pemaknaan kebebasan pers hal ini perlu guna menciptakan pers yang ideal bagi perkembangan negara, Hari Wiryawan (2007:141) mengingatkan kembali perlunya memperhatikan asas-asas hukum dalam kegiatan pers yaitu a) Asas kebebasan media, bahwa prinsip-prinsip kebebasan media secara hukum harus tercantum dalam konstitusi negara untuk menghindari penyelewengan dari kebebasan media sendiri. b) Asas Anti sensor, ada dua bentuk sensor, yaitu sensor preventif dan represif dimana dalam asas ini dihindari sensor preventif, karena sensor preventif akan mencegah informasi itu disebarkan yang pada akhirnya sama saja dengan melanggar hak untuk memperoleh informasi, c) Asas pertanggungjawaban sosial, bahwa setiap pekerjaan jurnalistik yang dilakukan oleh media massa juga harus diiringi dengan pertanggungjawaban oleh media tersebut terhadap dampak pemberitaan yang disajikan, d) Asas pembatasan kepemilikan, bertujuan untuk menjamin adanya kebhinekaan atau keberagaman pendapat. Keragaman pendapat atau isi bisa dicapai antara lain melalui keberagaman media. Keragaman media bisa dicapai bila terdapat keragaman pemilik media. Pembatasan kepemilikan dilatarbelakangi oleh

landasan pemikiran untuk menumbuhkan pemikiran yang demokratis maka diperlukan keragaman pendapat, e) Asas perlindungan profesi, perlindungan terhadap profesi dalam aspek hasil karya juga dalam proses kerja insan media. Perlindungan ini diperlukan karena setiap karya dari media massa memiliki nilai ekonomi yang tinggi. f) Asas perlindungan hak perseorangan, media memberikan jaminan bahwa hak pribadi harus mendapat perlindungan, misalkan perlindungan hak privasi ketika media massa melakukan kerja jurnalistiknya.

Harapan penulis terangkum melalui pendapat Lasswell (dalam Wahyuni, 2000:10) yang melihat fungsi media massa terhadap masyarakat pada tataran ideal sebagai berikut :

- a) Media massa berfungsi sebagai pengamat lingkungan, pemberi informasi tentang hal – hal yang berada diluar jangkauan penglihatan masyarakat luas.
- b) Media massa berfungsi melakukan seleksi, evaluasi dan interpretasi informasi. Media massa menyeleksi apa yang pantas dan perlu disiarkan
- c) Media massa berfungsi sebagai sarana penyampaian nilai dan warisan sosial budaya dari satu generasi kepada generasi lainnya.

Kemudian yang lebih penting lagi adalah bagaimana media massa dan kegiatan jurnalistiknya berjalan secara profesional, menurut Akinfeleye (1991) menjelaskan sikap – sikap profesional journalism yakni a) *Solidarity*, b) Kepercayaan (trust), c) *Objectivity*, d) *Certification*, e) *Training*, f) *Reward* dan g) *Code Of Ethics*. Amal Jamal dan Rana menambahkan “Jurnalisme adalah profesi, bukan hanya kesenangan dan bukan pekerjaan sampingan. Para jurnalis perannya adalah mentransfer berita secara profesional ke publik berdasarkan standar profesional yang didefinisikan dan dikenal. Pekerjaan tidak bisa dievaluasi dengan jumlah jam kerja. Ini adalah pekerjaan, dan hasilnya bisa sangat berat atau sangat ringan.”

KESIMPULAN

Dwifungsi media massa merupakan penggambaran bagaimana media massa memainkan perannya, untuk melihat bagaimana perannya tentu harus melihat bagaimana seluruh kegiatan media massa

secara utuh sampai kemudian *output* media massa dikonsumsi oleh publik, penilaian terhadap peran media massa harus terus dilaksanakan mengingat perannya yang begitu krusial terhadap perkembangan negara dan budaya negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno. *Mass Media dan Hukum*. Jakarta : Erlangga. 1977.
- Ardianto, Komala dan Karlina. 2009. *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Bungin, Burhan, 2006. *Sosiologi komunikasi*. Kencana pranada media group. Jakarta
- Effendy, Onnong. 1994. *Ilmu, Teori dan Filsafat komunikasi*. Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Hari Wiryawan, Dasar-Dasar Hukum Media, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007,
- Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat. 2006. *Jurnalistik, teori dan praktik*. Bandung: remaja rosdakarya.
- Mulyana, Deddy 2009, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nurudin 2004, *Komunikasi Massa*. Pustaka Pelajar, Bandung
- Ruben, Brent D & Stewart Lea P 2006, *Communication and Human Behaviour*. Allyn and Bacon, United States
- West, Richard dan Lynn H. Turner. 2008. *Pengantar Teori Komunikasi*: Jakarta: Salemba Humanika